



▶ PERLINDUNGAN ANAK

# 33 Daycare di Jogja Belum Berizin

**UMBULHARJO**—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mencatat adanya puluhan tempat penitipan anak (TPA) atau *daycare* yang belum mengantongi izin operasional. Dari total 69 TPA yang terdata, sebanyak 33 di antaranya belum memiliki legalitas lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan risiko dalam layanan pengasuhan anak.

Stefani Yullindriani & Arliq Fajar Hidayat  
 redaksi@harianjogja.com

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menjelaskan fenomena ini terjadi karena sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang sudah memiliki izin kemudian mengembangkan layanan penitipan anak tanpa mengurus perizinan baru secara terpisah. "PAUD dan TK itu sudah legal, tetapi ketika mengembangkan layanan sosial baru berupa penitipan anak, seharusnya berdiri sendiri. Namun ini masih dijadikan satu dan masih berlangsung," ujar Hasto di

Taman Budaya Embung Giwangan, Selasa (28/4).

Ia menegaskan, lembaga yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tetap wajib melengkapi izin tambahan jika membuka layanan TPA. Menurutnya, pencatatan administratif tidak cukup tanpa legalitas operasional yang sesuai dengan regulasi. "Tetap harus mengurus izin layanan penitipan anak. Kalau tidak ada izin, lebih baik tidak membuka layanan penitipan anak," katanya.

**PAUD dan TK itu sudah legal, tetapi ketika mengembangkan layanan sosial baru berupa penitipan anak, seharusnya berdiri sendiri. Namun ini masih dijadikan satu dan masih berlangsung.**

Hasto Wardoyo  
 Wali Kota Jogja

Hasto mengimbau seluruh pengelola TPA yang belum berizin segera mengurus legalitas. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kualitas layanan bagi anak-anak yang ditiptikan.

Sorotan terhadap keberadaan *daycare* di Jogja meningkat menyusul mencuatnya kasus dugaan kekerasan di TPA Little Aresha.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot membentuk tim khusus yang melibatkan psikolog dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Kesehatan Kota Jogja, serta Pemda DIY untuk memberikan pendampingan psikologis dan layanan kesehatan bagi korban. Pendampingan hukum juga disiapkan guna memastikan hak-hak korban tetap terlindungi.

**Butuh Waktu**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pemulihan psikologis anak korban dugaan kekerasan di *daycare* Little Aresha, membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan.

Esti mengaku sudah bertemu langsung dengan orang tua korban untuk menyerap aspirasi sekaligus

▶ Dari total 69 TPA yang terdata, sebanyak 33 di antaranya belum memiliki legalitas lengkap.

▶ Hasto mengimbau seluruh pengelola TPA yang belum berizin segera mengurus legalitas.

memahami kondisi anak-anak yang terdampak. "Pemulihan tidak selesai dalam waktu satu hingga dua tahun, tapi itulah kewajiban negara untuk memastikan mereka didampingi secara psikologis hingga pulih," ujarnya saat ditemui di Mapolresta Jogja, Senin (27/4).

Esti menekankan penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Ia meminta pemerintah daerah hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan kepada para korban.

Komisi X akan turut menyoroti aspek pengawasan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk standar pengasuhan dan keamanan di *daycare*. "Kasus ini dinilai menjadi alarm serius bagi semua pihak karena dampaknya langsung menasar anak usia dini, terutama dari sisi psikologis," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005